

**ANALISIS VIDEO “ PERKEMBANGAN KONSTITUSI YANG BERLAKU DI
INDONESIA”**

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Program Studi : S1 PGSD

Semester/Kelas : 2/F

Dosen Pengampu :1. Rapani, M.Pd.

2. Roy Kembar Habibi, M.Pd.



Disusun Oleh :

PUTRI AZZAHRA AISA

2413053182

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

HASIL ANALISIS

ANALISIS VIDEO “PERKEMBANGAN KONSTITUSI YANG BERLAKU DI INDONESIA ”

Dalam sejarah Indonesia, ada beberapa bentuk republik yang pernah berdiri menurut prof Jimly Asshiddiqie, berikut adalah perkembangan konstitusi di Indonesia sejak kemerdekaan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), (RI)
 - Periode: 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
 - Menerapkan sistem pemerintahan presidensial
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, (RIS)
 - Periode: 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
 - Membentuk negara federal
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), (NKRI)
 - Periode: 5 Juli 1950
 - Sistem pemerintahan parlementer
4. Kembali ke UUD 1945
 - Periode: 5 Juli 1959 – sekarang
 - Terjadinya permasalahan perbedaan pandangan mengenai piagam Jakarta antara agama Islam dan kebangsaan, perdebatan inilah yang membuat sila pertama mengalami penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta sehingga menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
 - Perdebatan mengenai dasar negara terus berlanjut yang mengakibatkan ketidakberhasilan koalisi kuante dalam membentuk konstitusi baru.
 - Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia Kembali ke UUD 1945 dengan adanya perubahan

Perbedaan UUD 1945 18 Agustus dan UUD 1959 5 Juli

1. Di lampiran
2. Pada UUD 1959 jelas disebutkan bahwa Piagam Jakarta memjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi.

Perubahan yang ada harus memperhatikan 2 catatan

1. Menggunakan metode addendum (lampiran) dan amandemen
2. Materi UUD 1945 dimasukkan menjadi pasal-pasal

Jadi yang kita jadikan pegangan sekarang ialah UUD 1959 ditambah dengan 4 dokumen atau lampiran baru.

PERMASALAHAN

- ❖ Masalah: Perdebatan islam dengan kebangsaan yang memiliki pandangan berbeda mengenai Piagam Jakarta
- ❖ Solusi: opini saya mengenai hal tersebut, Dengan keberagaman yang dimiliki Indonesia seperti Suku, Bahasa, Budaya dan Agama. Hal ini pastinya melahirkan sudut pandang yang beragam pula dan permasalahan piagam Jakarta mencerminkan hak tersebut. Tak dapat dipungkiri setiap kebijakan pastinya memiliki reaksi pro dan kontra. Kejadian yang seperti ini tak hanya terjadi dimasa lalu bahkan sekarang banyak sekali permasalahan yang terjadi akibat dari adanya pandangan yang berbeda contohnya program makan bergizi gratis atau (MBG) yang dirancang pemerintah. Dimana program ini menuai pro dan kontra, ada yang setuju dengan hal tersebut dan ada pula yang tak setuju contohnya kalangan mahasiswa, mereka merasa program ini tidak tepat dan tak efektif karna menurut mereka alokasi anggaran untuk (MBG) ini seharusnya lebih tepat jika dialihkan untuk mendukung Pendidikan gratis atau Pendidikan seharusnya lebih diutamakan. Nah masalah masalah seperti ini dapat diselesaikan dengan berkompromi secara adil dan saling menghargai tanpa memandang status. Pada permasalahan piagam Jakarta pemerintah telah berkompromi yang akhirnya mengubah sila pertama. Bayangin kalau saat itu pemerintah tidak berkompromi dan kebijakan tidak terbuka kepada pendapat rakyat dengan pihak islam ataupun masyarakat non islam mungkin negara kita akan memiliki konflik yang lebih besar antara kelompok agama dan nasionalis. Dengan adanya kompromi ini terlihat bahwa sampai sekarang Pancasila menjadi dasar negara yang kuat. Jadi setiap perbedaan pendapat itu pasti bisa diselesaikan asalkan kita mau bermusyawarah dan berkompromi secara adil tanpa memandang status dan tak merugikan orang lain maupun saling menghormati. Dan yang paling utama kita harus menjaga persatuan dengan tidak memandang diri kita lebih unggul dari yang lain.